



Ikhtisar Kebijakan (*Policy Brief*): Potensi Bahasa Indonesia dan Urgensi Kebijakan Bahasa di ASEAN

Ringkasan

Pada tahun 2021 hingga 2023, SEAMEO QITEP in Language (SEAQIL) bekerja sama dengan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) melakukan penelitian terkait kebijakan bahasa di sebelas negara ASEAN, yakni Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, Timor Leste, dan Vietnam. Penelitian difokuskan pada beberapa aspek, di antaranya, yaitu kebijakan terkait bahasa daerah, bahasa nasional, bahasa asing, dan minat pemuda setiap negara dalam mempelajari bahasa asing, termasuk bahasa ASEAN. Ikhtisar kebijakan (*policy brief*) ini

difokuskan pada potensi bahasa Indonesia dan urgensi kebijakan bahasa di kawasan ASEAN. Penelitian ini melibatkan 4.296 partisipan dari kalangan pemuda (2.705 pelajar sekolah menengah atas dan sederajat, 1.546 mahasiswa, dan 46 partisipan yang tidak menyebutkan level pendidikannya) serta 11 ahli pengajaran bahasa dari berbagai SEAMEO Centre, universitas, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di kawasan ASEAN.

Penelitian ini didasarkan pada teori mengenai kebijakan bahasa atau manajemen bahasa bahwa kebijakan bahasa merupakan pilihan dan bahwa kebijakan bahasa selalu berada pada tataran pemerintah pusat (Dixon, 2005; Hayes, 2020; Spolsky, 2009). *"A language policy is a policy mechanism that impacts the structure, function, use, or acquisition of language"* (Johnson, 2013: 9 dalam Gorter & Cenoz, 2017: 232).





Dengan demikian, maju tidaknya sebuah bahasa bergantung pada kebijakan pemerintah pusat terkait bahasa itu, yang itu merupakan sebuah pilihan.

Penelitian ini menggunakan survei untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dan disebar kepada partisipan di seluruh negara anggota ASEAN pada tahun 2022. Survei berisi berbagai pertanyaan, di antaranya mengenai (1) bahasa yang digunakan di sekolah, (2) bahasa asing yang digunakan di sekolah, (3) bahasa asing yang ingin dipelajari, dan (4) bahasa ASEAN yang ingin dipelajari. Keempat aspek ini dijelaskan dalam ikhtisar kebijakan (*policy brief*) yang disusun dan relevan untuk semua negara. Namun demikian, terkait bahasa ASEAN yang ingin dipelajari oleh partisipan, ditemukan data yang sangat penting bagi pengembangan bahasa Indonesia di kawasan ASEAN. Data penting ini berkaitan dengan potensi bahasa Indonesia untuk berkembang di kawasan ASEAN dan urgensi keberadaan dukungan hukum yang kuat berupa kebijakan bahasa yang diumumkan atau dideklarasikan di tingkat pemerintah pusat.

Menurut tim peneliti, data ini perlu dipaparkan dalam ikhtisar kebijakan (*policy brief*) yang disusun khusus bagi pemerintah Republik Indonesia.

Data yang diperoleh menunjukkan bahwa pemuda ASEAN yang menjadi partisipan penelitian ini, yang juga berasal dari berbagai negara ASEAN, mempunyai minat untuk mempelajari bahasa Indonesia. Namun demikian, walaupun bahasa Indonesia sudah dipelajari di negara-negara ASEAN melalui pengiriman guru ke berbagai negara ASEAN, data yang diperoleh dari para ahli pengajaran bahasa, termasuk bahasa asing dan bahasa ASEAN, menunjukkan ketidaktahuan mereka tentang diajarkannya bahasa Indonesia di negara mereka. Hal ini menunjukkan perlunya upaya yang lebih gigih dan kuat dari pemerintah pusat Indonesia bersama dengan pemerintah pusat negara-negara ASEAN untuk bekerja sama membuat kebijakan bahasa yang bisa mengembangkan bahasa Indonesia di kawasan ASEAN dan bahasa-bahasa ASEAN lainnya.

Pendahuluan

Penelitian yang dilakukan dilatarbelakangi oleh kondisi di masa sekarang ketika peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi salah satu program strategis di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdikbudristek RI. Hal ini terjadi terutama sejak berdirinya Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan (PPSDK) dan sekarang menjadi Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa (Pustanda). Salah satu tugas Pustanda adalah meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Salah satu program terkait peningkatan fungsi bahasa Indonesia itu adalah penguatan pengembangan program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing

(BIPA) yang telah dilakukan sejak tahun 2015. Meskipun program BIPA sudah ada di Indonesia sejak lama, mungkin sebelum tahun 1994, saat kongres BIPA pertama diadakan di Bandung, di IKIP Bandung (sekarang Universitas Pendidikan Indonesia), tetapi pada waktu itu program BIPA kurang memperlihatkan kemajuan yang pesat. Kemajuan yang cukup pesat dalam program BIPA dirasakan sejak dibentuknya PPSDK di level pemerintah pusat, yang mengatur program BIPA sebagai upaya untuk meningkatkan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional, seperti yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014.



Perkembangan BIPA bisa dilihat, di antaranya melalui banyaknya guru yang dikirim ke berbagai negara (misalnya pada tahun 2019 dilakukan pengiriman guru ke 32 negara), bahan ajar yang dibuat baik untuk pemelajar maupun untuk umum, dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) BIPA yang disusun untuk menjadi acuan pembelajaran BIPA di Indonesia serta di luar negeri atau di berbagai institusi di berbagai negara yang menawarkan BIPA.

Berkaitan dengan pengembangan BIPA tersebut, ASEAN merupakan salah satu target utama, mengingat ASEAN bukan hanya kawasan di mana Indonesia berada sebagai anggota, tetapi juga merupakan kawasan yang strategis. Negara-negara ASEAN, sebagai negara tetangga, seharusnya menjadi kelompok pertama yang mendukung perkembangan BIPA. Kawasan ini juga seharusnya menjadi yang pertama mendukung dijadikannya bahasa Indonesia sebagai bahasa asing yang dipelajari di kawasan

ASEAN melalui kebijakan pendidikan bahasa asing di setiap negara di ASEAN. Potensi dan tantangan yang dihadapi dalam pengembangan BIPA di kawasan ASEAN perlu dikaji untuk menentukan arah serta langkah yang tepat dalam upaya pengembangan BIPA di ASEAN.

Namun demikian, berdasarkan pengamatan peneliti, belum ada penelitian mengenai potensi dan tantangan dalam pengembangan BIPA di seluruh negara di kawasan ASEAN, khususnya di kalangan para pemuda ASEAN. Selain itu, kajian mengenai kebijakan bahasa terkait bahasa Indonesia sebagai bahasa asing di kawasan ASEAN belum dilakukan. Untuk itu, dalam rangka mengisi kekosongan, penelitian ini salah satunya difokuskan pada identifikasi potensi pengembangan atau pengajaran BIPA di ASEAN dan kebijakan bahasa Indonesia di kawasan ASEAN, dengan memperhatikan minat pemuda ASEAN dalam mempelajari bahasa Indonesia dan dukungan kebijakan untuk memastikan kelancaran pengembangan bahasa Indonesia di ASEAN.

Hasil Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian terkait pengembangan BIPA seperti yang diuraikan sebelumnya, data menunjukkan bahwa ada dua hal penting terkait pengembangan BIPA di kawasan ASEAN. Pertama adalah potensi pengembangan BIPA dilihat dari minat pemuda ASEAN untuk mempelajari bahasa Indonesia. Kedua adalah perlunya kebijakan bahasa, terutama bahasa Indonesia di kawasan ASEAN. Dua hal penting tersebut akan dipaparkan sebagai berikut.



Pertama, data mengenai bahasa ASEAN yang diminati untuk dipelajari oleh pemuda ASEAN disajikan dalam Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Bahasa ASEAN yang Diminati oleh Pemuda ASEAN

No.	Asal Negara Responden	Peringkat Pertama	Peringkat Kedua	Peringkat Ketiga	Peringkat Keempat
1	Brunei Darussalam	Bahasa Thai	Tagalog	Bahasa Melayu	Bahasa Indonesia
2	Filipina	Bahasa Thai	Bahasa Vietnam	Bahasa Indonesia	Bahasa Melayu
3	Indonesia	Bahasa Melayu	Bahasa Thai	Tagalog	Bahasa Vietnam
4	Kamboja	Bahasa Thai	Bahasa Vietnam	Bahasa Melayu	Bahasa Indonesia
5	Laos	Bahasa Vietnam	Tagalog	Bahasa Thai	Bahasa Indonesia
6	Malaysia	Bahasa Thai	Bahasa Melayu	Bahasa Indonesia	Tagalog
7	Myanmar	Bahasa Thai	Bahasa Vietnam	Bahasa Indonesia	Bahasa Burma
8	Singapura	Bahasa Indonesia & Bahasa Thai	Bahasa Melayu	Bahasa Vietnam	Tagalog
9	Thailand	Bahasa Indonesia	Bahasa Melayu	Tagalog	Bahasa Vietnam & Khmer
10	Timor-Leste	Bahasa Indonesia	Tagalog	Bahasa Thai	Tidak Ada Informasi
11	Vietnam	Bahasa Thai	Bahasa Indonesia	Bahasa Melayu	Khmer

Tabel 1 menunjukkan bahwa ada dua bahasa ASEAN yang diminati oleh para partisipan dalam penelitian dari semua negara ASEAN, yakni bahasa Thai dan bahasa Indonesia. Bahasa Thai menduduki peringkat pertama sebagai bahasa yang ingin dipelajari di tujuh negara selain Thailand, yakni di Brunei Darussalam, Filipina, Kamboja, Malaysia, Myanmar, dan Vietnam. Sementara itu, bahasa Indonesia menduduki peringkat pertama sebagai bahasa yang ingin dipelajari di tiga negara selain Indonesia, yakni Singapura, Thailand, dan Timor Leste; menduduki peringkat kedua di Vietnam; menduduki peringkat ketiga di Filipina, Malaysia, dan Myanmar; serta menduduki posisi keempat di Brunei Darussalam, Kamboja, dan Laos. Adapun tujuan atau alasan dari pemilihan bahasa-bahasa itu, di antaranya, yaitu kesempatan kerja, kesempatan mendapat beasiswa, kemampuan berkomunikasi, serta pengembangan diri.

Kedua, terkait kebijakan bahasa Indonesia di ASEAN, para ahli pengajaran bahasa asing di berbagai negara yang menjadi partisipan dalam penelitian tampaknya belum menyadari adanya

bahasa Indonesia yang diajarkan di negaranya. Semua ahli mengatakan bahwa tidak ada bahasa ASEAN yang diajarkan. Padahal, sejak tahun 2015, pemerintah Indonesia melalui PPSDK dan sekarang menjadi Pustanda telah mengirim guru ke berbagai negara ASEAN untuk mengajar di sekolah, di Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara itu, dan di universitas yang menawarkan bahasa Indonesia kepada peserta didiknya.

Hal ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia belum menjadi kebijakan bahasa di negara-negara ASEAN itu dan relevan dengan apa yang dibahas oleh Kirkpatrick (2009) bahwa ASEAN Charter, baik yang pertama maupun yang versi revisi, tidak menyebutkan aspek bahasa. Oleh karena itu, negara-negara ASEAN juga tampaknya tidak mempunyai komitmen dalam pengembangan dan pengajaran bahasa ASEAN. Hal ini juga disayangkan oleh para ahli kebijakan bahasa karena negara-negara ASEAN yang merupakan negara *superdiverse* dalam hal bahasa seharusnya mempunyai komitmen yang besar dalam mengembangkan bahasa ASEAN.

Rekomendasi

Berdasarkan paparan tersebut, rekomendasi-rekomendasi penting terkait peningkatan fungsi bahasa Indonesia di kawasan ASEAN adalah sebagai berikut.



1. Dibentuknya dukungan hukum (*legal backing*) yang kuat berupa kebijakan bahasa yang dicanangkan oleh pemerintah pusat negara-negara di kawasan ASEAN yang menjamin berlangsungnya pengembangan bahasa ASEAN, khususnya bahasa Indonesia. Untuk mendukung terbentuknya kebijakan bahasa ini, pemerintah pusat minimal diwakili oleh

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) hendaknya melakukan kerja sama yang intensif dengan setiap negara dalam mengembangkan

bahasa Indonesia dan bahasa ASEAN

lain melalui kerja sama yang saling menguntungkan. Sebagai bahasa yang telah terlebih dahulu diperkenalkan ke berbagai negara ASEAN, bahasa Indonesia perlu diupayakan untuk menjadi pilihan dalam kebijakan bahasa asing di ASEAN. Hal ini bisa dilakukan melalui pendekatan kerja sama bilateral atau multilateral melalui program pendidikan oleh pemerintah pusat. Perangkat hukum lain yang menjamin terselenggaranya program pengembangan BIPA di berbagai negara perlu juga diperhatikan, sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia serta undang-undang yang berlaku di negara masing-masing.

2. Pendirian sebuah pusat yang khusus mengurus bahasa-bahasa ASEAN, khususnya bahasa Indonesia di ASEAN, di bawah naungan kementerian yang bisa memajukan dan meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional.

3. Sosialisasi peran bahasa dalam pemajuan budaya, kualitas bangsa, dan kemajuan ilmu pengetahuan perlu dilakukan di kalangan para penguasa atau pembuat kebijakan di tingkat pusat agar kebijakan yang ada bisa betul-betul mendukung pemajuan bahasa yang ada di ASEAN, khususnya bahasa nasional ASEAN.

4. Pengembangan berbagai perangkat pendukung pengembangan program BIPA, seperti memfasilitasi pelaksanaan pembelajaran BIPA baik secara daring maupun luring, peningkatan kompetensi guru BIPA, dan pengembangan berbagai standar terkait BIPA, seperti standar kompetensi, standar kualifikasi pengajar, serta standar asesmen BIPA.

5. Kerja sama dengan berbagai lembaga dan kementerian yang dilakukan Kemdikbudristek untuk sama-sama menguatkan posisi bahasa Indonesia yang bernilai ekonomi, dalam arti bahwa kemampuan berbahasa Indonesia bisa membantu pemelajar bahasa Indonesia untuk mengikuti kegiatan akademik yang dibutuhkan sampai tingkat tinggi dan mendapatkan pekerjaan yang layak.

Kesimpulan

Berdasarkan paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa bahasa Indonesia diminati oleh pemuda ASEAN dan berpotensi untuk bisa berkembang di kawasan ASEAN. Dengan demikian, perlu dilakukan langkah serta arah yang tepat untuk mengakomodasi minat para pemuda ASEAN untuk mempelajari bahasa Indonesia. Selain itu, untuk mendukung pelaksanaan pengembangan bahasa Indonesia di ASEAN, perlu dukungan hukum yang kuat di kawasan ASEAN, yakni kebijakan bahasa di ASEAN yang tentu merupakan kebijakan yang dicanangkan di tataran pemerintah pusat untuk menjamin bahwa kebijakan itu berjalan dengan lancar.



Referensi

Dixon, L. Q. (2005). The bilingual education policy in Singapore: Implications for second language acquisition. In Cohen, J., McAlister, K.T., Rolstad, K., MacSwan, J. (Ed). *Proceedings of the 4th International Symposium on Bilingualism*. Pp. 625-635. Cascadilla Press.

Gorter, D., & Cenoz, J. (2017). Language education policy and multilingual assessment. *Language and Education*, 31(3), 231-248. <https://doi.org/10.1080/09500782.2016.1261892>

Hayes, D. (2020). Language education policy and practice in state education systems: Promoting effective practice in foreign language education for young learners. *Language Teaching for Young Learners*, 2(2), 240-261. <http://dx.doi.org/10.1075/ltyl.19017.hay>

Kirkpatrick, A. (2009). English as the working language of ASEAN: Pedagogical principles and implications. In Ward, C. (2009). (Ed). *Language teaching in a multilingual world. Anthology series 50*. SEAMEO RELC.

SEAMEO QITEP in Language

Jalan Gardu, Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Jakarta 12640, INDONESIA

Telephone: (021) 78884106

Pos-el: info@qiteplanguage.org/ppr@qiteplanguage.org

www.qitepinlanguage.org

